DPRD Setujui Raperda Pertanggung Jawaban Non APBD 2023 DIsahkan Jadi Perda



Selasa, 4 Juli 2023

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Non APBD 2023 telah disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Plh Bupati Pasuruan, Mujib Imron dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati terhadap pelaksanaan APBD 2022, yang mencatat pendapatan daerah mencapai Rp 3,35 triliun dan belanja daerah Rp 3,45 triliun, disetujui untuk dijadikan Perda. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp 97 miliar dalam laporan tersebut.

Meskipun disetujui, DPRD Kabupaten Pasuruan memberikan sejumlah sorotan terhadap kinerja Pemkab Pasuruan, terutama mengenai masalah parkir tepi jalan, percepatan penanganan jalan rusak, dan banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH). DPRD mendesak Pemkab Pasuruan untuk berkolaborasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat untuk percepatan penanganan jalan rusak. Selain itu, DPRD juga menyoroti rendahnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir tepi jalan dan meminta Pemkab Pasuruan memaksimalkan potensi pendapatan dari layanan parkir yang dikelola.

DPRD juga mengingatkan Pemkab Pasuruan untuk meningkatkan penanganan RTLH agar masyarakat dapat memiliki rumah yang lebih layak. Menanggapi hal tersebut, Plh Bupati Pasuruan, Mujib Imron menyatakan bahwa Pemkab Pasuruan akan menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan DPRD sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.